

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA  
YANG TERDAFTAR DI BEI  
PERIODE 2015-2019**

**SKRIPSI**

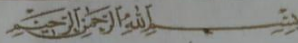
*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : ANGGI APRILIANA  
NPM : 1505170705  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : ANGGI APRILIANA  
NPM : 1505170705  
Program Studi : AKUNTANSI  
Kosentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si)

Penguji II

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE., M.Si)

**Pembimbing**

(IKHSAN ABDULLAH, SE., M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ANGGI APRILIANA  
N.P.M : 1505170705  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN  
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB  
SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI  
PERIODE 2015-2019

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2021

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : ANGGI APRILIANA  
N.P.M : 1505170705  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Nama Dosen Pembimbing : IKHSAN ABDULLAH, S.E., Ak., M.Si  
Judul Penelitian : PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masalah nya harus lebih diperjelas</li><li>- Harus ada didasari teori dan jurnal nya</li></ul>		
Bab II	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan cara kutipan dan penulisan</li><li>- Buku dan jurnal nya di sesuaikan</li></ul>		
Bab III	<ul style="list-style-type: none"><li>- Definisi operasional nya di perbaiki</li><li>- Populasi dan Sample nya di perbaiki</li></ul>		
Bab IV	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil penelitian kurang detail</li><li>- Pembahasan nya di perdalam lagi</li><li>- Pembahasan harus dpt menjawab rumusan masalah</li></ul>		
Bab V	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sesuaikan pembahasan nya dengan kesimpulan dan saran</li></ul>		
Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none"><li>- Semua buku, jurnal dan penelitian harus terisi di daftar pustaka</li></ul>		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Meja Hijau		

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Medan, Mei 2021  
Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI APRILIANA  
NPM : 1505170705  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



ANGGI APRILIANA

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019**

**ANGGI APRILIANA  
1505170705**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan selama lima tahun dan sebanyak enam perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak dan pengujian secara parsial membuktikan variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan**

**ABSTRACT**

**THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND COMPANY SIZE  
ON TAX AVOIDANCE IN SUB-SECTOR STONE MINING COMPANIES  
BARA LISTED ON THE IDX  
2015-2019 PERIOD**

**ANGGI APRILIANA  
1505170705**

*faculty of Economics and Business  
Muhammadiyah University of North Sumatra  
Jl. Captain Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238*

*This research was conducted with the aim of examining and analyzing the effect of institutional ownership and company size on tax avoidance in coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study were all coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange, while the samples that met the criteria for sampling were observations carried out for five years and as many as six coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research approach uses associative research. Data collection techniques in this study using documentation techniques. and the analysis technique used is multiple linear regression analysis, hypothesis testing and the coefficient of determination. The results showed that institutional ownership and company size had a significant effect simultaneously on tax avoidance and partial testing proved that institutional ownership had a significant effect on tax avoidance, company size had no effect on tax avoidance in stone mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange.*

**Keywords: Tax Avoidance, Institutional Ownership, Company Size**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Sukirman** dan Ibu **Supiyati** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.



Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ikhsan Abdullah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Buat seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Buat seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Medan, Februari 2021

Penulis

**ANGGI APRILIANA**  
**NPM.1505170705**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Pajak .....	9
2.1.2 Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ).....	11
2.1.3 Kepemilikan Institusional .....	14
2.1.4 Ukuran Perusahaan .....	16
2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Kerangka Konseptual .....	21
2.4 Hipotesa Penelitian .....	22
2.4.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.....	22

2.4.2	Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.....	23
2.4.3	Pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak .....	25
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1	Pendekatan Penelitian .....	27
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	27
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
3.4	Populasi dan Sample .....	30
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7	Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
4.1	Deskripsi Data.....	39
4.1.1	Deskripsi Data Penghindaran Pajak.....	39
4.1.2	Deskripsi Data Kepemilikan Institusional .....	40
4.1.3	Deskripsi Data Ukuran Perusahaan.....	41
4.2	Analisis Data.....	43
4.2.1	Uji Stastitik Deskriptif .....	43
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	43
4.2.3	Uji Regresi Linier Berganda .....	48
4.2.4	Uji Hipotesis .....	49
4.2.5	Uji Determinasi.....	52
<b>4.2.6</b>	<b>Pembahasan.....</b>	<b>53</b>

## **BAB 5 PENUTUP**

5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	59
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 1.1	Data Kepemilikan Institusional Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019 .....	3
Table 2.I	Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1	Skedul Rencana Penelitian.....	29
Tabel 3.2	Hasil Seleksi Saampel Perusahaan.....	31
Tabel 3.3	Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian.....	31
Tabel 3.4	Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin Watson).....	35
Tabel 4.1	Data Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara.....	39
Tabel 4.2	Data Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara .....	41
Tabel 4.3	Data Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara.....	42
Tabel 4.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4.5	Hasil Uji Kolmogrov-smirnov .....	45
Tabel 4.6	Hasil Multikolonieritas .....	46
Tabel 4.7	Hasil Uji Auto Korelasi .....	47
Tabel 4.8	Hasil Regresi Linier Berganda.....	48
Tabel 4.9	Hasil Uji t.....	50
Tabel 4.10	Hasil Uji F.....	52
Tabel 4.11	Hail Uji Koefesien Determinasi.....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	44
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastistas .....	47

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.786,38 triliun rupiah (72,6 persen) dari total pendapatan negara yang berjumlah 2.461,11 triliun rupiah ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2018).

(Mayangsari, Zirman, & Haryani, 2016) pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus terus meningkatkan usahanya dalam penerimaan pajak. Karena peran pajak dalam APBN sangat besar. Perusahaan adalah salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Kemampuan perusahaan dapat mengolah bahan baku hingga bernilai tambah menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Perusahaan juga salah satu wajib pajak yang memberikan pajak penghasilannya kepada negara. Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan milik perusahaan.

Kepemilikan Institusional adalah faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk

investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajemen.

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan ETR, ETR merupakan jumlah pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor. Dengan teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi ETR, maka Ditjen Pajak dapat melihat karakteristik tertentu dari perusahaan perusahaan model apa yang masih memiliki tarif pajak efektif tinggi (rendah), sehingga pemerintah bisa mempertimbangkan pemberian insentif (disinsentif) pajak yang tepat.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil menurut perusahaan, menurut beberapa cara antara lain: total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik (Tandean 2015). Menurut (Nurfadilah et al, 2016). Dalam

penelitiannya menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan makin kompleks. Untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset.

**Table 1.1**  
**Data Kepemilikan Institusional Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019**

Perusahaan	Tahun	Kepemilikan Institusional	Ukuran Perusahaan	Penghindaran Pajak
		Saham yang dimiliki x saham yang beredar	Ln (Total Aktiva)	Beban pajak / laba sebelum pajak
ARII	2015	3,96	21,98	0,02
	2016	3,92	21,91	0,33
	2017	3,37	21,9	1,22
	2018	4,2	21,97	0,44
	2019	4,28	22,01	0,01
DEWA	2015	1,64	22,03	1
	2016	1,56	22,06	1,34
	2017	1,43	22,11	0,83
	2018	1,43	22,14	0,76
	2019	0,14	22,42	0,08
ADARO	2015	2,33	22,5	0,46
	2016	2,33	22,59	0,37
	2017	2,33	22,64	0,42
	2018	2,28	22,67	0,41
	2019	2,28	22,69	0,34
BSSR	2015	0,34	21,27	0,13
	2016	0,34	21,33	0,97
	2017	0,34	21,46	0,2
	2018	0,34	21,61	0,04
	2019	0,34	21,64	0,26
BUMI	2015	1,41	21,94	0,21
	2016	2,19	21,85	0,49
	2017	2,19	22,03	0,32
	2018	7,74	22,08	1,37
	2019	7,74	22,04	2,56
PTBA	2015	1,09	16,64	0,23
	2016	1,09	16,73	0,24
	2017	1,09	16,90	0,26
	2018	1,09	17,00	0,24
	2019	1,02	17,07	0,25

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional sendiri pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan, kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investai perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Cahyono et al., 2016). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Wijayani, 2016).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan dengan cara tertentu. Menurut (Rinaldi, 2015) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaanaan untuk melakukan aktifitas ekonominya.perusahaan yang memiliki total asset yang besar menunjukkan perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan menghasilkan laba yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang memiliki total asset sedikit atau rendah. Semakin besar ukurannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Nurfadilah et al. 2016).

Menurut (Hartono, 2010) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: Ukuran perusahaan adalah sebagai algoritma dari total aset diprediksi mempunyai hubungan negative dengan rasio, kemudian perusahaan yang besar cenderung berinvestasi ke proyek yang mempunyai varian rendah, untuk menghindar laba yang dtahan. Untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset..

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan. Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan cash effective tax rate (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak digunakan karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindarn pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dyreng, et.al 2010). Menurut (Kurnia, 2010), penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.



Menurut (Gozali, 2017) ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan pajak, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar dimasyarakat terbatas.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019"**.

### **1.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 mengalami peningkatan sementara penghindaran pajaknya menurun.
2. Ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sub sektor batu bara periode 2015-2019 mengalami peningkatan dan sementara penghindaran pajaknya menurun.
3. Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 mengalami peningkatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
3. Apakah kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara bersama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindran pajak, serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Bagi Perusahaan**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk menentukan kebijakan dalam penghindaran pajak.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada masalah yang sama.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Pajak merupakan penopang utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Akan tetapi, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018)

##### **2.1.1.1 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Menurut (Mardiasmo, 2018), Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi dua:

### 1. Official Assesment System

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri official assesment system :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajakoleh fiskus.

### 2. Self Assesment System

Self Assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Self Assesment System :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3. Withholding System

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri Withholding System :

- a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### **2.1.1.2 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018), Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

##### **1. Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

##### **2. Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.2 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.



Menurut (Bernard, 1976), pengertian tax avoidance adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga meminimalisir pembayaran pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011).

Menurut (Suandy, 2011) ada beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Sumarsana, 2010).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh (Zain, 2008) terdapat dua potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak, yaitu:

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu berusaha mengindarkan pajak terutang secara ilegal. Upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar. Mereka akan dihukum serta yakin bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Dari definisi (Zain, 2008), dapat disimpulkan poin pertama merupakan pengertian dari penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak sering dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (tax planning) yang merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan

baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Kusumaputri, 2018).

Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Effective Tax Rate (ETR). Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal (Sandy & Lukviarman, 2015) Effective Tax Rate (Tarif Pajak Efektif) dihitung dengan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

Adapun rumus untuk menghitung Tarif efektif pajak menurut (Sandy & Lukviarman, 2015) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### **2.1.3 Kepemilikan Institusional**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010). Menurut (Widiastuti et al, 2013), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar dari pada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kondisi di mana institusi atau lembaga eksternal yang

turut memiliki saham di dalam perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham karena dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa dividen (Patricia, 2014). Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Kusmawati & Wiksuana, 2018).

Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham, manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor-investor institusional sehingga kinerja manajemen juga akan meningkat (Lapian & Dewi, 2018).

Kepemilikan institusional dianggap sebagai efek substitusi dari upaya untuk meminimalkan biaya keagenan melalui kebijakan dividen dan utang. Oleh karena itu, untuk menghindari inefisiensi penggunaan sumber daya, diterapkan kebijakan dividen yang lebih rendah (Widiastuti et al 2013).

### **2.1.3.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan (Indah ningrum & Handayani, 2009). Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fitriyah & Hidayat, 2011).

### **2.1.4 Ukuran Perusahaan**

#### **2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar penjualan yang diperoleh perusahaan. Penjualan (sales) merupakan kegiatan utama suatu perusahaan yang memiliki pengaruh strategis terhadap perusahaan dan berkaitan dengan kompetisi dalam industri. Agar dapat melakukan penjualan perusahaan membutuhkan aktiva perusahaan.

Menurut (Sartono, 2010), Perusahaan besar yang sudah well established (berkedudukan kuat) akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudian akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

Definisi ukuran perusahaan menurut (Torang, 2013) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: Ukuran Perusahaan adalah dapat menentukan besarnya

jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan.

Pengertian ukuran perusahaan menurut (Riyanto, 2010) merupakan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai perusahaan ataupun hasil total aktiva dari suatu perusahaan.

Dengan demikian, maka perusahaan yang besar akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pertumbuhan yang didasarkan pada penjualan, dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

#### **2.1.4.2 Manfaat dan Tujuan Ukuran Perusahaan**

Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strategi usahanya dengan efektif dan efisien.

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki. Menurut (Sawir, 2004) ukuran perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal
- 2) Kekuatan tawar menawar dalam kontrak keuangan
- 3) Pengaruh skala dalam biaya dan return



Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena semakin besar perusahaan, biasanya mereka mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tinggi karena didukung oleh asset yang besar sehingga kendala perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sejenisnya dapat teratasi.

Menurut (Nuraini, 2010) menyatakan bahwa: “ada 3 teori yang secara implisit menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat keuntungan perusahaan”. 3 teori tersebut adalah:

- 1) Teori teknologi yang menekankan pada modal fisik, economic of scale, dan lingkup sebagai faktor-faktor yang menentukan besarnya ukuran perusahaan yang optimal serta pengaruhnya terhadap keuntungan.
- 2) Teori organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas dengan ukuran perusahaan yang dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi.
- 3) Teori institutional mengaitkan ukuran perusahaan dengan faktor-faktor seperti sistem perundang-undangan, peraturan antitrust, perlindungan patent, ukuran pasar, dan perkembangan pasar keuangan.

#### **2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan akan pendanaan yang lebih besar memiliki kecenderungan bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan dalam laba.

Menurut (Riyanto, 2010), suatu perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya control dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya perusahaan yang kecil di mana sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya control pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian maka pada perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

#### **2.1.4.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi.

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan (Prastowo, 2011) mengemukakan bahwa: “Asset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.”

Sedangkan menurut (Sartono, 2010) menyatakan bahwa: “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.”

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log total aktiva karena untuk memudahkan penelitian disebabkan oleh jumlah total aktiva perusahaan mencapai puluhan triliyun sedangkan variabel devenden

maupun independen menggunakan skala pengukuran rasio oleh sebab itu, ukuran perusahaan diukur menggunakan log total aktiva.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Table 2.I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Fitri Damayanti Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.5 (2015)	Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan return on assets berpengaruh terhadap tax avoidance.
2	Wijayani Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol.13 (2016)	Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corporate governance dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Rini Handayani Jurnal Akuntansi Vol.10 (2018)	Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang Listing di BEI periode tahun 2012-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh secara parsial terhadap Return on Asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Leverage tidak berpengaruh parsial terhadap penghindaran pajak. Hasil dari penelitian simultan ada

			pengaruh Return on Asset (ROA), Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4	Vivi Adeyani Tandean Seminar Nasional Multi Disiplin ilmu & call of pappers unisbank	Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013	Hasil penelitian secara simultan menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan merupakan penjelas yang signifikan terhadap tax avoidance, hasil penelitian secara parsial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.
5	I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan / E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 18.3 Maret (2017)	Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan leverage terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan jasa yang tercatat di BEI	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, profitabilitas, kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

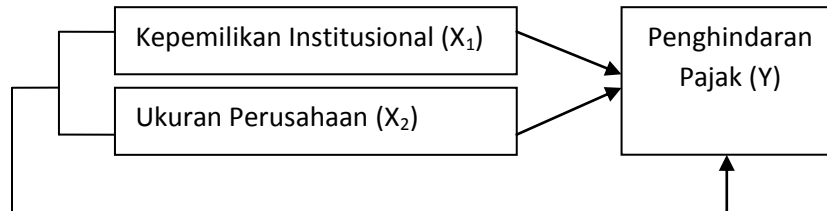
### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau

teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

Hipotesis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual



## 2.4. Hipotesa Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer disuatu perusahaan (Zahirah et al. 2018).

Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan

yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014). Sehingga semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Cahyono et al., 2016), (Feranika, 2016), (Marfirah & Syam, 2016), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Wijayani, 2016), (Putri & Putra, 2017), (Jasmine & Paulus, 2016), (Alviyani et al, 2016), (Praditasari & Setiawan, 2017) dan (Okrayanti et al, 2017), yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Diantari & Ulupui, 2016), (Damayanti & Susanto, 2015), (Sunarsih & Oktaviani, 2016) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

#### **2.4.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Menurut (Traxler & Huemer, 2007) mengemukakan ukuran perusahaan adalah kriteria yang paling sering digunakan untuk demarkasi domain keanggotaan, sesuatu yang menggaris bawahi relevansi kriteria ini sebagai

perbedaan dalam kepentingan bisnis. Sedangkan menurut (Sartono, 2010), Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudian akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukannya semakin kompleks. Selain itu, ukuran perusahaan dengan total aset yang relatif besar cenderung lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba. Karena laba yang besar tentu akan meningkatkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. (Nurfadilah et al 2016) Hal tersebut yang dapat memberikan peluang kemungkinan perusahaan untuk memanfaatkan celah perpajakan yang ada dan mendorong manajemen agar melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksinya yang kompleks.

Penelitian Tommy dalam (Nengsih et al, 2019) juga mendefinisikan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (compliance) atau agresif (tax avoidance) dalam perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Putri & Putra (2017), (Diantari & Ulupui, 2016), (Jasmine & Paulus, 2017), (Alviyani et al, 2016), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Okrayanti et al, 2017), (Handayani, 2018), (Dewinta & Setiawan, (2016), (Richmadenda & Pratomo, 2018), (Prihananto & Nuraina, 2018), dan (Wijayanti et al, 2016) yang menyatakan bahwa tingkat ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Cahyono et al., 2016),

(Tandean, 2015), (Mahanani et al, 2016), (Nengsih et al, 2018) menyatakan bahwa tingkat ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **2.4.3 Pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Menurut (Widiastuti et al, 2013), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar dari pada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, perusahaan yang memiliki total asset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang relatif kecil (Daniati & Suhairi, 2006). Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan (Zahirah et al.2018). Begitupula dengan ukuran perusahaan, Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Selain itu, ukuran perusahaan dengan total aset yang relatif besar cenderung lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba. Karena laba yang besar tentu akan



meningkatkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. (Nurfadilah et al 2016).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Cahyono et al., 2016), (Putri & Putra, 2017), (Diantari & Ulupui, 2016), (Tandean, 2015), (Jasmine & Paulus, 2017), (Alviyani et al, 2016), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Okrayanti et al, 2017) yang menyatakan bahwa pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

H3 : Kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, Disebut metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic (Sugiyono, 2018). Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2019. Data penelitian ini diperoleh dari Annual Report perusahaan dengan cara mengakses di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Defenisi Operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (*Dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi, terikat, tergantung oleh variabel lain yakni variabel bebas. Variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan

memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap illegal.

Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Effective Tax Rate (ETR). Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan 31 tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiscal (Sandy & Lukviarman, 2015). Effective Tax Rate (Tarif Pajak Efektif) dihitung dengan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

Adapun rumus untuk menghitung Tarif efektif pajak adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab pengaruhnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain.

Kepemilikan Institusional dapat dihitung menggunakan rumus :

$$INST = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$



### **3.4 Populasi dan Sample**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 sebanyak 6 perusahaan.

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai 2016.
- 2) Perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang memiliki data keuangan lengkap dan telah menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit setiap tahun dari tahun 2015-2019 yang berisi informasi yang lengkap yang dapat membantu dalam penelitian ini.

**Tabel 3.2**

**Hasil Seleksi Sampel Perusahaan**

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Baru Bara Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019	47
2	Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Baru Bara Yang menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	25
3	Data yang tidak lengkap untuk penelitian	12
4	Perusahaan yang diambil menjadi sampel penelitian	6
Jumlah		4

**Nama Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ARII	Atlas Resources Tbk
2	DEWA	Darma Henwa Tbk
3	ADRO	Adaro Energy Tbk
4	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk
5	BUMI	Bumi Resource Tbk
6	PTBA	Bukit Asam Tbk

Sumber : *www.idx.co.id*

Berdasarkan kriteria diatas, maka perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang masuk dalam kriteria adalah sebanyak 6 perusahaan. Dengan lima kali publikasi laporan keuangan dari tahun 2015-2019, dan menghilangkan data-data ekstrim menggunakan data sehingga jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 30 data penelitian.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.5.1 Jenis Data**

##### 1. Data Kuantitatif

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data bersifat kuantitatif, sehingga dapat berupa angka atau dapat diukur dari laporan keuangan periode penelitian yang dimulai dari tahun 2015-2019.

#### **3.5.2 Sumber Data**

##### 1. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder dimana data tersebut telah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia yang berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara selama periode 2015 sampai 2019.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder), serta studi pustaka dari berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Data sekunder berisi tentang data-data annual report yang mencakup data perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2019.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program

SPSS for Windows. Sebelum melakukan hipotesis dengan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala linier atau uji asumsi klasik dan setelah itu dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F (uji simultan), uji t (uji parsial), dan uji koefisien determinan R<sup>2</sup>.

### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2016). Mean digunakan untuk menghitung rata – rata variabel yang dianalisis. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan di sektor pajak. Analisis deskriptif ini tidak bertujuan untuk pengujian hipotesis.

### 3.7.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastitas, uji multikorelinearitas, dan uji autokorelasi. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus terpenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada.

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data variabel independen dan data variabel dependen pada persamaan regresi berdistribusi normal atau tidak.



Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan normal P-P Plot. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% dengan melihat signifikansi dari nilai Kolmogorov-Smirnov  $> 5\%$ , maka data yang digunakan berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Dan normalitas juga dapat terpenuhi jika titik-titik pada grafik Normal P-P Plot menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal grafik.

#### 3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedosisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi adalah model yang baik yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

#### 3.7.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi ini adalah dengan menganalisis matrik korelasi variabel – variabel bebas dan apabila korelasinya signifikan antar variabel bebas tersebut maka terjadi multikolinearitas. Seperti yang dijelaskan oleh (Ghozali, 2006) sebagai berikut :

- a. Jika nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- b. Jika nilai tolerance  $< 0,1$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Apabila terjadi suatu korelasi, maka dinamakan ada suatu problem autokorelasi. Masalah ini dapat terjadi karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2011).

Menurut Ghozali (2011), untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi digunakan nilai Durbin Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin Watson)**

<b>Hipotesis Nol</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Kondisi</b>
ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dL \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi Negatif	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tidak ada autokorelasi Negatif	No Decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi Negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber :Data yang diolah penulis

Keterangan:

d =durbin watson

dU =*upperbound* (batas atas)

dL = *lowerbound* (batas bawah)

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Ganda

Analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel dependen hanya pada satu variabel independen dengan atau tanpa variabel moderator, serta untuk mengetahui ketergantungan satu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

$$Y_a = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KUA + e$$

Keterangan :

Ya : Penghindaran Pajak

$\alpha$  : konstanta

e : error

$\beta$  : koefisien regresi

KI : Kepemilikan Institusional

KUA : Ukuran Perusahaan

### 3.7.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien adalah dari nol sampai satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai  $R^2$

yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2011).

### 3.7.5 Uji Statistik F

Pengujian yang dilakukan ini adalah dengan uji parameter (uji korelasi) dengan menggunakan uji F statistik. Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat digunakan uji F. Menurut (Sugiyono, 2018) dirumuskan sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - K - 1)}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Distribusi F ini ditentukan oleh derajat kebebasan pembilang dan penyebut, yaitu k dan (n-k-1). Untuk uji F, kriteria yang dipakai adalah:

- a. Ho diterima bila  $F_{hitung} < F_{table}$  atau  $Sig. 0.05 \geq \alpha$  artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Ho ditolak bila  $F_{hitung} > F_{table}$  atau  $Sig. 0.05 \leq \alpha$ , artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (Juliandi, Irfan and Manurung, 2014).

### 3.7.6 Uji Statistik t

Uji T dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak berubah. Apabila tingkat signifikan yang diperoleh lebih

kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima variabel independen tersebut berhubungan secara statistik terhadap variabel dependen. Uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Menurut Sugiyono (2016), menggunakan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai uji t

r= Koefisien korelasi pearson

r<sup>2</sup>= Koefisien determinasi

n= jumlah sampel

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Ho diterima jika nilai hitung statistik uji (t hitung) berada di daerah penerimaan

Ho, dimana t hitung < t tabel atau - t hitung > - t tabel atau nilai sig > α

b. Ho ditolak jika nilai hitung statistik uji (t hitung) berada di daerah penolakan

Ho, dimana t hitung > t tabel atau - t hitung < - t tabel atau nilai sig < α

(Juliandi, Irfan and Manurung, 2014).

**BAB 4**  
**HASIL PENELITIAN**

**4.1 Hasil Penelitian**

**4.1.1 Deskripsi Data Penghindaran Pajak**

Pajak merupakan penopang utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Akan tetapi, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak.

Menurut (Kurnia, 2010) menyatakan bahwa :“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat- akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Berikut ini adalah data penghidaran pajak pada perusahaan kemasan dan plastik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 4.1**  
**Data Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019**

Kode Perusahaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
ARII	0,02	0,33	1,22	0,44	0,01
DEWA	1,00	1,34	0,83	0,76	0,08
ADARO	0,46	0,37	0,42	0,41	0,34
BSSR	0,13	0,97	0,20	0,04	0,26
BUMI	0,21	0,49	0,32	1,37	2,56
PTBA	0,23	0,24	0,26	0,24	0,25

Sumber : Bursa Efek Indonesia (2021)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat di lihat bahwa masih tingginya nilai penghindaran pajak pada perusahaan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sedangkan menurut (Lim, 2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

#### **4.1.2 Deskripsi Data Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham oleh lembaga keuangan non bank, lembaga hukum, yayasan, institusi luar negeri dan lembaga lainnya pada akhir tahun. Data kepemilikan institusional dapat dilihat di catatan atas laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan aspek ekonomi entitas yang beroperasi secara individu tetapi berada dalam satu pengendalian. Struktur kepemilikan institusi menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan (Putri & Christiana 2017)

Berikut adalah data kepemilikan institusional pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

**Tabel 4.2**  
**Kepemilikan Institusional Pada Perusahaan Sektor Batu Bara Yang**  
**Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019**

Kode Perusahaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
ARII	3,96	3,92	3,37	4,20	4,28
DEWA	1,64	1,56	1,43	1,43	0,14
ADARO	2,33	2,33	2,33	2,28	2,28
BSSR	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
BUMI	1,41	2,19	2,19	7,74	7,74
PTBA	1,09	1,09	1,09	1,09	1,02

**Sumber : Bursa Efek Indonesia (2021)**

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional sendiri pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan, kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investai perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Cahyono et al., 2016).

#### **4.1.3 Deskripsi Data Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar penjualan yang diperoleh perusahaan. Penjualan (sales) merupakan kegiatan utama suatu perusahaan yang memiliki pengaruh strategis terhadap perusahaan dan berkaitan dengan kompetisi dalam industri. Agar dapat melakukan penjualan perusahaan membutuhkan aktiva perusahaan

Menurut (Sartono, 2010) perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan



perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.

Berikut adalah data ukuran perusahaan pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

**Tabel 4.3**  
**Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019**

Kode Perusahaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
ARII	21,98	21,91	21,90	21,97	22,01
DEWA	22,03	22,06	22,11	22,14	22,42
ADARO	22,50	22,59	22,64	22,67	22,69
BSSR	21,27	21,33	21,46	21,61	21,64
BUMI	21,4	21,85	22,03	22,08	22,04
PTBA	16,64	16,73	16,90	17,00	17,07

**Sumber : Bursa Efek Indonesia (2021)**

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan dengan cara tertentu. Menurut (Rinaldi, 2015) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktifitas ekonominya. Perusahaan yang memiliki total asset yang besar menunjukkan perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan menghasilkan laba yang lebih besar dibanding dengan perusahaan yang memiliki total asset sedikit atau rendah. Semakin besar ukurannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Nurfadilah et al. 2016).

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Berikut ini data penelitian berupa data tabulasi kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang akan diolah menggunakan SPSS v, 24,00,

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	30	.14	7.74	2.1943	1.92616
Ukuran Perusahaan	30	16.64	22.69	21.1737	1.99212
Penghindaran Pajak	30	.01	2.56	.5267	.54233
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24.0

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 2,1943 dan jumlah data adalah 30. Nilai tertinggi kepemilikan institusional sebesar 7,74 dan nilai terendah sebesar 0,14.
2. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 21,1737 dan jumlah data adalah 30. Nilai tertinggi ukuran perusahaan sebesar 22,69 dan nilai terendah sebesar 16,64.
3. Nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,5267 dan jumlah data adalah 30. Nilai tertinggi penghindaran pajak sebesar 2,56 dan nilai terendah sebesar 0,01.

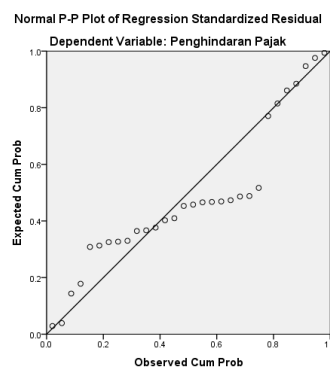
### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui Apakah suatu variabel bormal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi

data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan *mean* dan standar deviasi yang sama. Jadi asumsi klasik pada dasarnya memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut.

#### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui Apakah variabel dalam sebuah model regresi, yaitu variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi secara normal atau tidak.



Sumber: Data diolah SPSS versi 24.0  
**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas**

Pada grafik normal p-plot terlihat pada gambar diatas bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *Kolmogrov Smirnov* (K-S). Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak normal. uji *Kolmogrov Smirnov* yaitu Asymp, Sig. lebih kecil dari 0,05 (Asymp, Sig. < 0,05 adalah tidak normal).

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Kolmogorov-smirnov**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Predicted Value
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.5266667
	Std. Deviation	.31851716
Most Extreme Differences	Absolute	.207
	Positive	.207
	Negative	-.170
Test Statistic		.207
Asymp. Sig. (2-tailed)		.102 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: SPSS Versi 24.00

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai K-S variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak telah berdistribusi secara normal karena dari masing-masing variabel memiliki probabilitas lebih dari 0,05 yaitu  $0,207 > 0,05$

Nilai masing-masing variabel yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dapat dilihat pada baris *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari baris tersebut nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,105. Ini menunjukkan variabel berdistribusi secara normal.

#### **4.2.2.2 Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen (bebas). Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) yang tidak melebihi 0,10 atau 5.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan Uji Multikolinieritas pada data yang telah diolah berikut ini :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemilikan Institusional	.911	1.098
	Ukuran Perusahaan	.911	1.098

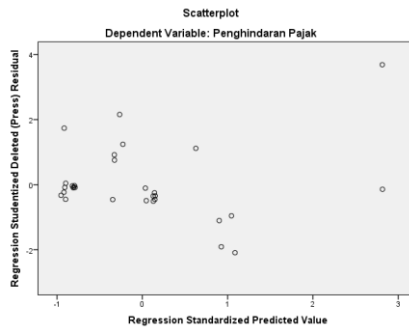
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai tolerance sebesar  $0.911 > 0.10$  dan nilai VIF sebesar  $1,098 < 5$ . variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance sebesar  $0.911 > 0.10$  dan nilai VIF sebesar  $1,098 < 5$ . Dari masing-masing variabel memiliki nilai tolerance  $> 0.1$  dan nilai VIF  $< 5$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam penelitian ini.

#### 4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada atau tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian *error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode *chart* (Diagram *Scatterplot*).



Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00  
**Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk satu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 2.2.2.4 Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode ke t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai *Durbin Watson (D-W)* :

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.587 <sup>a</sup>	.345	.296	.45490	1.613
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional					
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak					

Sumber : SPSS 24.00

Dari tabel 4.7 diatas bahwa nilai Durbin Watson (DW hitung) adalah sebesar 1,613 Dengan demikian tidak ada autokorelasi didalam model regresi karena DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

### 4.2.3 Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memiliki dua variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan satu variabel dependen yaitu peghindaran pajak.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.207	.920		-.225	.824
	Kepemilikan Institusional	.159	.046	.564	3.454	.002
	Ukuran Perusahaan	.018	.044	.067	.409	.686

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00

Dari tabel 4.8 diatas diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

1. Konstanta = -0,207
2. Kepemilikan institusional = 0,159
3. Ukuran perusahaan = 0,018

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = -0,207 + 0,159_1 + 0,018_2$$

Jadi persamaan diatas bermakna jika :

1. Persamaan regresi berganda diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar - 0,207 dengan tanda negatif menunjukkan bahwa jika independen yaitu kepemilikan institusional (X1) dan ukuran perusahaan (X2) dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka penghindaran pajak(Y) adalah sebesar -0,207.
2. Kepemilikan institusional mempunyai koefisien regresi sebesar 0.159 menyatakan bahwa apabila kepemilikan institusional ditingkatkan (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka nilai penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0.159. Namun sebaliknya, jika Kepemilikan institusional turun (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah), maka akan menurun penghindaran pajak sebesar 0.159.
3. Ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi sebesar 0.018 menyatakan bahwa apabila ukuran perusahaan ditingkatkan (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah) maka nilai penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0.018. Namun sebaliknya, jika ukuran perusahaan turun (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah), maka akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0.018

#### **4.2.4 Pengujian Hipotesis**

##### **4.2.4.1 Uji t (Uji Parsial)**

Uji t digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen. Alasan lain uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).



**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji t**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.207	.920		-.225	.824
	Kepemilikan Institusional	.159	.046	.564	3.454	.002
	Ukuran Perusahaan	.018	.044	.067	.409	.686

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00

Hasil pengujian statistic t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 30 - 2 = 28$  adalah  $2.048 t_{hitung} = 3,454$  dan  $t_{tabel} = 2.048$

$H_0$  diterima jika  $-2.048 \leq t_{hitung} \leq 2.048$  pada  $\alpha = 5\%$

$H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > 2.048$ , atau  $-t_{hitung} < -2.048$

Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kepemilikan institusional adalah 3,454 dan  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$  diketahui sebesar 2.048 dengan demikian  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikan kepemilikan institusional sebesar  $0.002 < 0.05$  artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu barayang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 30 - 2 = 28$  adalah  $t_{hitung} = 0,409$  dan  $t_{tabel} = 2,048$

$H_0$  diterima jika :  $-2,048 \leq t_{hitung} \leq 2,048$  pada  $\alpha = 5\%$

$H_0$  ditolak jika :  $t_{hitung} > 2,048$ , atau  $-t_{hitung} < -2,048$

Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel ukuran perusahaan adalah 0.409 dan  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$  diketahui sebesar 2.048 dengan demikian  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikan ukuran perusahaan sebesar  $0.686 > 0.05$  artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima ( $H_a$  ditolak) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 4.2.4.2 Uji F (Uji Signifikan Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variable bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variable terikat (Y).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 24.00 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.942	2	1.471	7.109	.003 <sup>b</sup>
	Residual	5.587	27	.207		
	Total	8.529	29			
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional						

Sumber : SPSS versi 24.00

$$f_{\text{tabel}} = 30 - 2 - 1 = 27$$

$$f_{\text{hitung}} = 7,109 \text{ dan } f_{\text{tabel}} = 3,35$$

Kriteria pengambilan keputusan :

$H_0$  diterima jika :  $-3,35 \leq f_{\text{hitung}} \leq 3,35$ , untuk  $\alpha = 5\%$

$H_0$  ditolak jika :  $f_{\text{hitung}} > 3,35$ , atau  $-f_{\text{hitung}} < -3,35$  untuk  $\alpha = 5\%$

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai  $f_{\text{hitung}}$  sebesar 7,109 dengan tingkat signifikan sebesar 0.003. Sedangkan nilai  $f_{\text{tabel}}$  diketahui sebesar 3,35. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa  $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$  ( $7,109 > 3,35$ ) artinya  $H_0$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Nilai *R-square* dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai *R-square* semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengujian statistiknya :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.587 <sup>a</sup>	.345	.296	.45490
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional				
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak				

Sumber: SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari R square sebesar 0.345 yang berarti 34,5% dan hal ini menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebesar 34,5% untuk mempengaruhi variabel penghindaran pajak. Selanjutnya selisih  $100\% - 34,5\% = 65,5\%$ . hal ini menunjukkan 65,5% variabel lain yang tidak berkontribusi terhadap penelitian penghindaran pajak.

#### **4.2.6 Pembahasan**

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Berikut ini ada tiga bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **4.2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel kepemilikan institusional adalah 3,454 dan  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$  diketahui sebesar 2.048 dengan demikian  $t_{hitung}$

lebih besar dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikan kepemilikan institusional sebesar  $0.002 < 0.05$  artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak ( $H_a$  diterima) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia maka tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya semakin longgar sehingga rentan terjadi kecurangan didalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan institusional mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau,

mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer disuatu perusahaan (Zahirah et al. 2018).

Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Hasil ini memberikan arti bahwa struktur kepemilikan institusional didalam perusahaan memiliki hubungan yang erat atau pengaruh terhadap tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya semakin longgar sehingga rentan terjadi kecurangan didalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Lesmana, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Cahyono et al., 2016), (Feranika, 2016), (Marfirah & Syam, 2016), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Wijayani, 2016), (Putri & Putra, 2017), (Jasmine & Paulus, 2016), (Alviyani et al, 2016), (Praditasari & Setiawan, 2017) dan (Okrayanti et al, 2017), yang menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### **4.2.6.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel ukuran perusahaan adalah 0.409 dan  $t_{tabel}$  dengan  $\alpha = 5\%$  diketahui sebesar 2.048 dengan demikian  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  dan nilai signifikan ukuran perusahaan sebesar  $0.686 > 0.05$  artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima ( $H_a$  ditolak) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar penjualan yang diperoleh perusahaan. Penjualan (sales) merupakan kegiatan utama suatu perusahaan yang memiliki pengaruh strategis terhadap perusahaan dan berkaitan dengan kompetisi dalam industri. Agar dapat melakukan penjualan perusahaan membutuhkan aktiva perusahaan

Menurut (Sartono, 2010) perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal disbanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Cahyono et al., 2016), (Tandean, 2015), (Mahanani et al, 2016), (Nengsih et al, 2018) menyatakan bahwa tingkat ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### **4.2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa nilai  $f_{hitung}$  sebesar 7,109 dengan tingkat signifikan sebesar 0.003. Sedangkan nilai  $f_{tabel}$  diketahui sebesar 3,35. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $7,109 > 3,35$ ) artinya  $H_0$  ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap



penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan sektor batu bara maka tingkat penghindaran pajak akan semakin meningkat. Dimana semakin besar suatu perusahaan dan tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga pihak manajemen akan berusaha untuk memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan dengan cara melakukan penghindaran pajak.

Pajak merupakan penopang utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Akan tetapi, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak.

Menurut (Kurnia, 2010) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Menurut (Sanjaya & Jufrizen 2017) kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun

asing. Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi atau lembaga eksternal yang turut memiliki saham didalam perusahaan.

Menurut Sartono (2010, hal.249) perusahaan besar yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal disbanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.

Hasil Penelitian (Ngadiman, 2014), (Nadia Fathurrahmi Lawita, 20149) Bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

,

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh maupunn analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019 sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu barayang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa secara parsial ikitan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu barayang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa secara similtan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu barayang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagi investor institusional yang merupakan pemilik saham mayoritas hendaknya tidak terlalu mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mengabaikan pemegang saham minoritas agar tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan yang semakin melebar.
2. Bagi perusahaan agar lebih efektif untuk mengelola jumlah aset yang dimilikinya sehingga laba yang di terima perusahaan akan semakin meningkat.
3. Pihak manajemen agar lebih mampu meminimalisir jumlah pajak yang di tanggunginya.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Dalam faktor mempengaruhi penghindaran pajaknya menggunakan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sedangkan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Adanya keterbatasan peneliti dalam memperoleh data yang peneliti hanya gunakan selama lima tahun berturut-turut mulai dari 2015 hingga 2019, sedangkan masih banyak data yang bisa digunakan.
3. Adanya keterbatasan peneliti dalam memperoleh sampel yang peneliti hanya gunakan hanya 6 perusahaan, sedangkan masih banyak perusahaan lain yang bisa digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011–2013. *Journal of Accounting*, 2(2), 1–17.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kurnia, R. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusmawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(5), 2592–2620.
- Juliandi, A., Irfan, I. and Manurung, S. (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Medan: UMSU Press.
- Kusumaputri, E. S. (2018). *Komitmen Pada Perubahan Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lapian, Y., & Dewi, S. K. S. (2018). Peran Kebijakan Deviden Dalam Memediasi Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 816–846.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: BPEE.
- Mayangsari, C., Zirman, Z., & Haryani, E. (2016). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 2(2), 1–15.
- Ngadiman., & Puspitasari, C (Nuraini, H. (2010). Perenan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut. *Jurnal Kartika Wijaya Kusuma*, 18(1), 32–43.
- Prastowo, D. (2011). *Analisa Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Riyanto, B. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JAAI: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 1–12.
- Sartono, R. A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (EDISI KEEM.)*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsana, T. (2010). *Perencanaan Perpajakan*. Jakarta: Indeks.
- Torang, S. (2013). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayani, D. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Governance dan Kepemilikan Instutisional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 107–124.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KepemilikanInstitusional	30	.14	7.74	2.1943	1.92616
Ukuran Perusahaan	30	16.64	22.69	21.1737	1.99212
PenghindaranPajak	30	.01	2.56	.5267	.54233
Valid N (listwise)	30				

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
PenghindaranPajak	.5267	.54233	30
KepemilikanInstitusional	2.1943	1.92616	30
Ukuran Perusahaan	21.1737	1.99212	30

Correlations				
		PenghindaranPajak	KepemilikanInstitusional	Ukuran Perusahaan
Pearson Correlation	PenghindaranPajak	1.000	.584	.235
	KepemilikanInstitusional	.584	1.000	.299
	Ukuran Perusahaan	.235	.299	1.000
Sig. (1-tailed)	PenghindaranPajak	.	.000	.105
	KepemilikanInstitusional	.000	.	.054
	Ukuran Perusahaan	.105	.054	.
N	PenghindaranPajak	30	30	30
	KepemilikanInstitusional	30	30	30
	Ukuran Perusahaan	30	30	30

Variables Entered/Removed <sup>a</sup>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ukuran Perusahaan, KepemilikanInstitusional <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak  
b. All requested variables entered.

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.587 <sup>a</sup>	.345	.296	.45490	.345	7.109	2	27	.003	1.613

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, KepemilikanInstitusional  
b. Dependent Variable: PenghindaranPajak

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.942	2	1.471	7.109	.003 <sup>b</sup>
	Residual	5.587	27	.207		
	Total	8.529	29			

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak  
b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, KepemilikanInstitusional

Coefficients <sup>a</sup>													
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.207	.920		-.225	.824	-2.094	1.680					
	KepemilikanInstitusional	.159	.046	.564	3.454	.002	.064	.253	.584	.554	.538	.911	1.098
	UkuranPerusahaan	.018	.044	.067	.409	.686	-.073	.109	.235	.079	.064	.911	1.098

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak

CollinearityDiagnostics <sup>a</sup>							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	KepemilikanInstitusional	UkuranPerusahaan	
1	1	2.688	1.000	.00	.04	.00	
	2	.308	2.955	.00	.89	.00	
	3	.004	25.975	.99	.06	1.00	

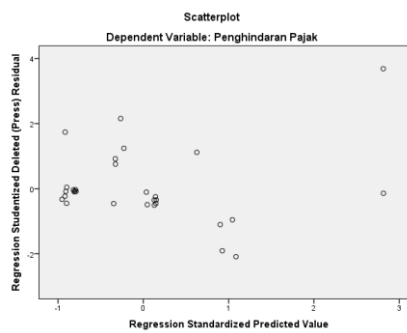
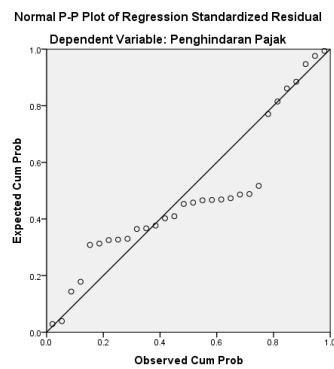
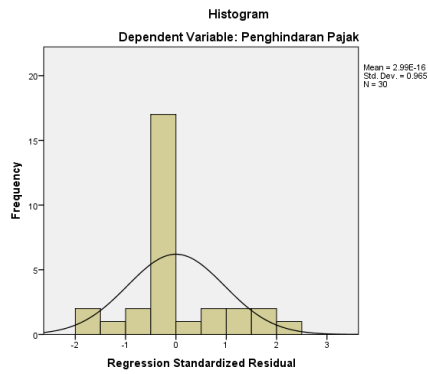
a. Dependent Variable: PenghindaranPajak

Residuals Statistics <sup>a</sup>					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.2232	1.4236	.5267	.31852	30
Std. Predicted Value	-.953	2.816	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.088	.260	.135	.049	30
Adjusted Predicted Value	.1795	1.4494	.5138	.29016	30
Residual	-.86300	1.13714	.00000	.43894	30
Std. Residual	-1.897	2.500	.000	.965	30
Stud. Residual	-1.972	3.045	.012	1.040	30
Deleted Residual	-.93208	1.68728	.01286	.51562	30
Stud. Deleted Residual	-2.091	3.688	.036	1.133	30
Mahal. Distance	.127	8.489	1.933	2.348	30
Cook's Distance	.000	1.495	.066	.271	30
Centered Leverage Value	.004	.293	.067	.081	30

a. Dependent Variable: PenghindaranPajak



# Charts



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.5266667
	Std. Deviation	.31851716
Most Extreme Differences	Absolute	.207
	Positive	.207
	Negative	-.170
Test Statistic		.207
Asymp. Sig. (2-tailed)		.102 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		